

**Nama** : Budi Afrizal  
**NIM** : 0601120696  
**Judul** : Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hili pada Peningkatan Jalan Ibukota Kecamatan Gaung Anak Serka Tahun 2011  
**Dosen Pembimbing** : Drs. M.Y. Tiyas Tinov, M.Si  
**Email** : budiafrizal19@gmail.com  
**HP** : 081275478480

#### *ABSTRACT*

Roads in the Capital District Child Echoes Echoes Children sergeant in District sergeant (GAS) Indragiri Hilir (Inhil) is a connecting road between the City Inhil Tembilahan as the Capital District with a district in Inhil that can be traversed by road. This road is vital for society Inhil because not all districts in Inhil can be traversed by road, most districts in Inhil receipts can only be traversed by the river path. Given that, Inhil District Government in 2010 initiated in 2011 in order to improve the quality of roads is budgeted to the Capital District Child Echoes sergeant who was very poor condition. Echoes of the Capital District Child road sergeant was almost entirely inundated by tidal water holes and rivers so that people who pass this way must be careful and accelerate the speed of the vehicle only between 20-30 KM / Hr. That is why it takes the attitude of the government to improve roads with potholes repair and improvement pengaspalannya. The purpose of this study is to Know the Performance Department of Public Works (MPW) Inhil to increase road in the Capital District Child Echoes of sergeant. Theory (approach) is used as a tool of analysis in this study is the theory and the theory of policy performance. While the methods used in this research is descriptive quantitative research that is intended to provide a systematic overview of the observed phenomena.

Based on this study, the improvement in the District GAS made by DPU still seems sluggish. that road has been constructed and maintained by the DPU is still diverse responses from the public, this is due to some priority areas preferred process so that people who live in areas that are not a priority in the region feel the way it tends to lack of attention. While the user community participation in road maintenance that has been built according to the society gets more value in terms of performance DPU. After the road was completed DPU always make posts that guarded the road built by the community, the invitation is an effort to monitor the DPU than 6 months. Vehicle restriction policy by the respondent is a positive thing for maintaining the roads that have dibangun, this is done to prevent or to slow the decline.

**Keywords:** Development, Region, Street, Performance.

## LATAR BELAKANG MASALAH

Perhatian pemerintah yang sungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan sesuai dengan yang menjadi harapan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan barang dan jasa serta pelayanan yang optimal. Kinerja instansi pemerintah akhir-akhir ini menjadi sorotan terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Rakyat mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Oleh sebab itu, suatu instansi pemerintah harus benar-benar memperhatikan pelayanan yang diberikan itu serta melaksanakannya sesuai dengan tujuan pelayanan publik itu sendiri. Berbicara soal pelayanan pemerintahan, berarti tidak hanya mengacu pada pelayanan berbentuk pelayanan administrasi, lebih daripada itu pelayanan berbentuk fisik seperti pembangunan infrastruktur jalan adalah kewajiban untuk membuka akses masyarakat yang selama ini terisolasi. Pembangunan jalan yang dalam instansi pemerintah merupakan tanggungjawab Dinas Pekerjaan Umum (DPU) harus mampu mengawasi jika pembangunan jalan sedang berlangsung, sebab pada tahap pembangunan ini seringkali terjadi kecurangan oleh pihak pelaksana (kontraktor) yang mengakibatkan kualitas jalan menjadi tidak sesuai dengan harapan. DPU harus aktif dalam pengawasan di lapangan yang tentunya sesuai dengan kewenangannya yakni dengan melakukan pemantauan secara berkala.

Begitu juga halnya yang harus dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terhadap terhadap pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan dalam Ibukota Kecamatan Gaung Anak Serka (Gas) di Kecamatan Gaung Anak Serka (Gas) Inhil. Sebagai gambaran, Jalan ini merupakan jalan penghubung antara Kota Tembilahan sebagai Ibukota Kabupaten Inhil dengan beberapa Kecamatan di Inhil yang dapat dilalui dengan jalan darat. Jalan ini sangat vital bagi masyarakat Inhil sebab tidak semuanya kecamatan di Inhil dapat dilalui dengan jalur darat, kebanyakan kecamatan di Inhil hanya dapat dilalui dengan menggunakan jalur sungai. Mengingat hal itulah, Pemerintah Kabupaten Inhil pada tahun 2010 berinisiatif agar tahun 2011 dianggarkan untuk meningkatkan kualitas jalan ke Ibukota Kecamatan Gaung Anak Serka yang saat itu kondisinya sangat memprihatinkan. Berikut ini adalah tabel anggaran peningkatan Jalan dalam Ibukota Kecamatan Gaung Anak Serka tahun 2011:

Tabel I.1  
Anggaran Peningkatan Jalan dalam IKK Gas tahun 2011

Pekerjaan	Tahun Anggaran	Panjang/KM	Sumber Dana	Jumlah Anggaran
Peningkatan Jalan Dalam Ibukota Kecamatan Ganung Anak Serka (JI Merdeka)	2011	2,2 Km	APBD	Rp. 200.000.000

Sumber: Dinas PU Inhil

Jalan Ibukota Kecamatan Gaung Anak Serka ini hampir seluruhnya berlubang dan tergenang pasang air sungai, sehingga masyarakat yang melewati jalan ini harus hati-hati dan memacu kendaraan hanya kecepatan antara 20-30 KM/Jam. Maka dari itulah dibutuhkan sikap pemerintah untuk peningkatan jalan tersebut dengan memperbaiki jalan yang berlubang dan peningkatan pengaspalannya.

Permasalahannya adalah jalan Ibukota Kecamatan Gaung Anak Serka tersebut tampak tidak ada perubahan sama sekali dari kondisi sebelumnya. Berdasarkan pantauan penulis di lapangan, kondisi jalan ini justru semakin memprihatinkan dari sebelumnya, artinya adanya program peningkatan jalan pada tahun 2011 lalu tidak membawa dampak terhadap perbaikan jalan. Dengan demikian penulis berasumsi bahwa pihak Dinas Pekerjaan Umum tidak melakukan pengecekan di lapangan ketika proyek peningkatan jalan dilakukan oleh kontraktor perbaikan hanya dilakukan seadanya, dan berdampak terhadap kondisi jalan saat ini.

## **KONSEP TEORITIS**

### **Kinerja**

Kata kinerja merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu "*performance*". Oleh penulis dan peneliti terdahulu diartikan sebagai prestasi kerja dengan pengertian yang dikatakan dengan prestasi kerja adalah kemampuan untuk mencapai hasil yang lebih baik dan menonjol ke arah tercapainya tujuan organisasi (Moekijat: 1991).

Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi/instansi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum sesuai dengan moral maupun etika (Prawirosentono:2000: 78).

Agus Dwiyanto (1995:1) mengemukakan pejabat birokrasi seringkali menempatkan capaian target sebagai kinerja dari ukuran organisasi publik, sementara masyarakat pengguna jasa lebih suka menggunakan kualitas layanan sebagai ukuran kinerja, sehingga terdapat 5 indikator untuk menilai kinerja organisasi publik, yaitu:

#### **1. Produktivitas**

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas adalah kemampuan organisasi untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk menghasilkan sesuatu yang maksimal.

#### **2. Kualitas Layanan**

Isu kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai kinerja organisasi publik yang muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik.

3. Responsivitas

Responsivitas merupakan kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi.

4. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik secara eksplisit maupun implisit.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik merujuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsi adalah para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat.

Kata kinerja merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *“performance”*. Oleh penulis dan peneliti terdahulu diartikan sebagai prestasi kerja dengan pengertian yang dikatakan dengan prestasi kerja adalah kemampuan untuk mencapai hasil yang lebih baik dan menonjol ke arah tercapainya tujuan organisasi (Moekijat, 1991:23).

Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi/instansi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum sesuai dengan moral maupun etika. Menurut Irawan (2000:12), kinerja adalah suatu kajian perilaku yang selalu dihubungkan dengan kemampuan dan motivasi dimana kemampuan terbentuk dari keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki.

Sandra j. Hale menyatakan bahwa ada dua cara utama bagi institusi untuk mencapai kinerja yang tinggi adalah:

- a. Memusatkan pada misi yang berorientasi pada komitmen.
- b. Memastikan bahwa seluruh pegawai dilibatkan sepenuhnya dalam pengelolaan pekerjaannya (Salusu, 1998: 57).

Hasibuan mengemukakan definisi kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan. Kinerja merupakan gabungan dari tiga faktor penting, yaitu:

- a. Kemampuan dan minat seorang pekerja.
- b. Kemampuan dan penerimaan atas penjelasan delegasi tugas.
- c. Peran dan tingkat motivasi seorang pekerja (Hasibuan:2001: 90).

## **Kebijakan**

Memahami konsep kebijakan publik (*public policy*), dipandang perlu untuk mempertanyakan, apa saja yang telah tercakup di dalamnya, karena kegiatan pemerintah mencakup seluruh aspek kehidupan warga masyarakat. Kebijakan publik pada dasarnya meliputi keseluruhan aspek kehidupan baik yang bersifat memberikan pelayanan, melakukan pengaturan mendistribusikan apa saja yang menjadi harta benda dan kekayaan negara, menggali sumber daya alam untuk memobilisasi dana untuk negara, melaksanakan kegiatan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat dan lain sebagainya. Kegiatan pembuatan kebijaksanaan mencakup beberapa hal seperti dikemukakan oleh Rasyid dkk (2002:239) yaitu:

1. Kegiatan membuat kebijaksanaan yang bersifat distributif
2. Kebijakan yang mengatur kompetisi
3. Kebijaksanaan yang mengatur perlindungan
4. Kebijaksanaan yang menyangkut redistribusi kekayaan masyarakat
5. Kebijaksanaan yang bersifat ekstratif
6. Kebijaksanaan strategis
7. Kebijaksanaan karena krisis

Dalam pembuatan kebijakan publik tersebut membutuhkan pemahaman yang jelas tentang apa sesungguhnya kebijakan publik. Untuk memahami kebijakan publik, para ahli memberikan pengertian tentang kebijakan diantaranya Thomas R. Dye (dalam Islamy, 2000:18) mengemukakan bahwa "*Is whatever governments choose to do or not to do*".

Selanjutnya kebijakan publik/kebijakan negara dikemukakan juga oleh Anderson (dalam Solihin, 2002:5) bahwa Kebijakan publik atau kebijakan negara memberikan implikasi:

1. Kebijakan negara itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau dengan kata lain bahwa kebijakan itu harus berorientasi pada tujuan
2. Kebijakan itu berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan atau akan menyatakan sesuatu.
4. Kebijakan negara itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk melakukan sesuatu; dan
5. Bahwa kebijakan pemerintah merupakan-setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundangan yang bersifat memaksa.

Kebijakan publik selain dapat menentukan arah umum yang harus ditempuh untuk mengatasi masalah dalam masyarakat dapat pula menentukan ruang lingkup permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk, cara bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. Konsep kebijakan publik (*public policy*) menurut Sulaeman (1998:24), adalah sebagai suatu proses yang mengandung pola aktivitas tertentu dan merupakan seperangkat keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dalam beberapa cara yang khusus. Dengan demikian, konsep *public policy* berhubungan dengan pola aktifitas pemerintahan mengenai sejumlah masalah serta mengandung tujuan

Kebijakan negara sebagai suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah seperti parlemen, kepresidenan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, mempunyai kekuatan untuk selalu dapat memaksa setiap anggota masyarakat agar selalu tunduk dan mengikutinya dan lembaga-lembaga itupun berhak memaksakan kewajibannya. David Easton (dalam Islamy, 2002:19) memberikan arti kebijakan negara sebagai “*The authoritative allocation of values for the whole society*”

Suroto (1991:50), berpendapat bahwa kebijakan publik dapat diartikan Serangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan juga petunjuk-petunjuk yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut terutama dalam bentuk peraturan-peraturan atau dekrit-dekrit pemerintah.

Pendapat itu menyiratkan bahwa kebijakan publik berhubungan dengan keputusan dan masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Kebijakan ini dapat dalam bentuk berupa aturan-aturan sebagai petunjuk bagi pelaksana kebijakan. Menurut Soewargono (1997:12), kebijakan publik merupakan arahan-arahan yang bersifat otoritatif untuk melaksanakan tindakan-tindakan pemerintahan di dalam yurisdiksi nasional, regional, municipal maupun lokal.

Dalam memahami pendapat yang dikemukakan oleh para pakar, dapat ditemukan dua kubu tentang kebijakan publik. Ada yang memandang kebijakan publik sebagai suatu keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu, ada pula yang menganggap kebijakan publik memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan. Namun suatu hal yang hampir dapat dipastikan bahwa apapun isi rumusan kebijakan publik, semuanya bermuara pada satu tujuan yaitu demi memenuhi kepentingan publik. Dengan kata lain, kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi pemerintah kepada kepentingan publik. “Sehubungan dengan fungsi “*regeren*” pemerintah yaitu menetapkan kebijakan dalam rangka memimpin kekuatan-kekuatan kemasyarakatan menuju masyarakat yang dicita-citakan” (Soerwargono, 1997:45). Hal ini tentunya berkenaan dengan keberadaan pemerintah sebagai personifikasi dari negara dimana pada negara melekat apa yang disebut kekuatan memaksa yang absah, yang bertugas menyiapkan, menentukan dan menjalankan kebijakan atas nama dan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.

## **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Teluk Pinang, yakni Ibukota Kecamatan Ganung Anak Serka Kabupaten Inhil. Penulis tertarik meneliti di lokasi ini sebab proyek peningkatan yang jalan dianggarkan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan masyarakat serta tidak begitu berdampak terhadap akses transportasi warga.

## **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian mengenai keadaan status, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu klas peristiwa pada masa sekarang (Daymon: 2002:44). Sedangkan tujuan penelitian deskriptif kualitatif ini adalah untuk memuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki dengan teori-teori yang dioperasionalkan. (Suharto, 1993: 35).

## PEMBAHASAN

### Hasil Kerja Secara Umum

Yakni indikator yang menunjukkan *outcomes* atau *benefits* diberi bobot yang lebih tinggi daripada indikator yang menunjukkan *inputs* atau *outputs*. Pada tahun anggaran 2006 Dinas Pekerjaan Umum Inhil memiliki program kerja yaitu kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Inhil dalam pengawasan pekerjaan peningkatan Jalan Ibukota Kecamatan Gaung Anak Serka.

Pada proyek pemeliharaan jalan indikator *input* diperoleh dari persentase antara realisasi dan target anggaran belanja proyek pemeliharaan jalan dan jembatan. Indikator *output* diperoleh dari persentase realisasi panjang jalan yang dapat dipelihara dengan target panjang jalan yang akan dipelihara. Indikator *outcome* diperoleh dari panjang jalan yang mantap (baik) dengan jumlah panjang jalan dalam pengawasan pekerjaan peningkatan Jalan Ibukota Kecamatan Gaung Anak Serka.

Menurut masyarakat sebagai pengguna jalan, dan setelah penulis melakukan perbandingan antara capaian yang dipaparkan oleh DPU dengan kepuasan masyarakat akan kinerja DPU ini, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.1  
Tanggapan Masyarakat terhadap Capaian Kinerja DPU Inhil

No	Indikator	Kategori Jawaban (%)			Jumlah (%)	
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik		
1	Adanya perbaikan jalan dari tahun ke tahun	7 (31,81%)	8 (36,36%)	7 (31,81%)	22	100
2	DPU respon terhadap kondisi jalan yang rusak	6 (27,27%)	6 (27,27%)	10 (45,45%)	22	100
Jumlah		13	14	17	44	200
Rata-Rata		6	7	8	22	100
Persentase		27,27%	31,81%	36,36%		

Sumber: Data Olahan lapangan Tahun 2013

Tabel tersebut menunjukkan bahwa apa yang telah dijelaskan oleh DPU tentang capaian kinerja mereka ternyata belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang dirasakan masyarakat secara luas. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, perbaikan jalan yang dilakukan oleh DPU dari tahun ke tahun dijawab responden dengan kategori baik sebesar 7 orang, sama dengan yang menyatakan kurang baik, sementara yang menyatakan cukup adalah sebesar 8 orang. Ini berarti dapat disimpulkan bahwa perbaikan jalan belum sepenuhnya merata.

Tujuan dan Sasaran

Yakni indikator yang lebih erat kaitannya dengan tujuan dan sasaran, serta kebijaksanaan, program dan kegiatan diberi bobot yang lebih tinggi. Yang menjadi tujuan DPU adalah membantu pimpinan Pemerintah Daerah Inhil dalam membuat perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dalam mengelola dan melaksanakan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sedangkan yang menjadi Sasaran adalah terlaksananya tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang ke PU-an dan dapat memberikan pelayanan prima di bidangnya.

Salah satu tujuan utama DPU adalah meningkatkan kualitas jalan serta memelihara jalan yang telah mantap agar memiliki daya tahan yang lama. Dari anggaran yang tergambar pada bahasan sebelumnya kelihatan bahawa DPU Inhil begitu serius perhatiannya terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Inhil dalam pengawasan pekerjaan peningkatan Jalan Ibukota Kecamatan Gaung Anak Serka.

Anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah Inhil untuk mengatasi persoalan jalan ini mencapai belasan miliar rupiah dengan harapan dapat mengatasi masalah jalan yang tiap waktu perlu perhatian yang lebih untuk kabupaten yang tekstur tanahnya rawa-rawa ini.

Tujuan dan sasaran suatu kebijakan adalah kepuasan yang ada dalam masyarakat dari adanya kebijakan tersebut yang dalam penelitian ini adalah kepuasan dari masyarakat Kota Tembilahan akan kinerja DPU dalam menyediakan jalan yang mantap serta memeliharanya dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian ini, masyarakat yang menjadi responden menyatakan pengawasan pekerjaan peningkatan Jalan Ibukota Kecamatan Gaung Anak Serka masih perlu dimantapkan, selain itu jalan yang telah diperbaiki harusnya diupayakan pemeliharannya semaksimal mungkin. Berikut ini adalah tabel mengenai kepuasan masyarakat tersebut:

Tabel III.2

Kepuasan Masyarakat Terhadap pengawasan pekerjaan peningkatan Jalan Ibukota Kecamatan Gaung Anak Serka Oleh DPU Inhil

No	Indikator	Kategori Jawaban (%)			Jumlah (%)	
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik		
1	Adanya Pemeliharaan Jalan oleh DPU	8 (36,36%)	7 (31,81%)	7 (31,81%)	22	100
2	Pemeliharaan tersebut mengikutsertakan Masyarakat	7 (31,81%)	9 (40,90%)	6 (27,27%)	22	100
Jumlah		15	16	13	44	200
Rata-Rata		8	8	6	22	100
Persentase		36,36%	36,36%	27,27%		

Sumber: Data Olahan lapangan Tahun 2013

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tanggapan masyarakat mengenai pemeliharaan jalan yang telah dibangun oleh DPU yang merupakan tujuan dan sasaran instansi ini hasilnya hampir berimbang. Adanya pemeliharaan jalan oleh DPU setelah selesainya jalan tersebut dibangun ditanggapi responden dengan baik sebesar 8 orang atau 36,36% dari 22 responden. Sementara yang mengatakan cukup baik pemeliharaan itu sebanyak 7 orang atau 31,81% dari 22 orang. Sedangkan yang menyatakan kurang baik terdapat 7 orang atau 31,81% dari keseluruhan responden. Ini menandakan bahwa jalan yang telah dibangun dan dipelihara oleh DPU masih beragam tanggapan dari masyarakat, ini dikarenakan adanya beberapa wilayah yang prioritas pengerjaannya diutamakan sehingga masyarakat yang tinggal di wilayah yang bukan prioritas merasa jalan di wilayahnya itu cenderung kurang perhatian.

### **Kreatifitas**

Yakni indikator yang mempunyai keterkaitan dengan kebijaksanaan instansi yang lebih tinggi serta kreatifitas dalam menjalankannya, diberi bobot tinggi.

Kreatifitas dalam hal ini adalah kebijakan yang dikekuarkan oleh DPU sebagai pemegang otoritas dalam merumuskan persoalan infrastruktur di Kabupaten Inhil serta menunjukkan kreatifitas yang tinggi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. pengawasan pekerjaan peningkatan Jalan Ibukota Kecamatan Gaung Anak Serka memang merupakan suatu kendala bagi pemerintah, biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaannya hampir dua kali lipat dari pembangunan jalan di daerah lain. Ini disebabkan oleh keadaan tanah yang gambut.

Maka dari itulah DPU Inhil sudah seharusnya menunjukkan kreatifitasnya bdalam mensiasati tanah yang gambut tersebut, cara yang perlu bagi DPU adalah bagaimana menggunakan anggaran yang terbatas untuk menghasilkan jalan yang mampu bertahan selama bertahun-tahun mengingat usia jalan rata-rata pekerjaan peningkatan Jalan Ibukota Kecamatan Gaung Anak Serka setelah diaspal hanya berkisar 5-8 tahun. Pada standar jalan yang baik setelah diaspal adalah berkisar antara 10-15 tahun.

DPU Inhil dalam hal mengatasi persoalan ini harus melakukan koordinasi dengan instansi lain seperti Dinas Perhubungan. Sejauh ini, upaya yang dilakukan oleh DPU bekerja sama dengan Dinas Perhubungan adalah melakukan pembatasan kendaraan yang memasuki wilayah Kecamatan GAS. Kendaraan angkutan barang hanya boleh memasuki wilayah ini hanya yang beroda 4 dan roda 6. Lebih dari itu akan diberi sanksi oleh pihak berwajib. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas PU Inhil mengenai pembatasan angkutan ini menurutnya sangat tepat untuk menjaga turunnya jalan. Berikut hasil wawancaranya:

*“Mengingat kondisi tanah di daerah ini yang gambut dan rawa, tentunya dalam pembangunan jalan memakan waktu dan biaya yang besar, biayanya bahkan dua kali lipat lebih besar dari pembangunan jalan di daerah lain. Dan juga usia jalan yang dibangun tidak lama seperti di wilayah lain, jika daerah lain jalan yang baru diaspal akan mampu*

*bertahan 10-15 tahun maka di wilayah ini hanya bertahan 5-8 tahun saja, setelah itu harus dilakukan pengaspalan ulang atau peninggian aspal. Nah untuk menjaga agar jalan yang telah diaspal tersebut bisa bertahan lebih lama sangat dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang mantap. Salah satu upaya yang kami lakukan untuk memelihara jalan yang telah diaspal adalah dengan melakukan pembatasan kendaraan yang memasuki wilayah kecamatan tadi”.*

Sedangkan menurut masyarakat yang merupakan objek pembangunan jalan tersebut menyatakan bahwa kreatifitas yang dilakukan oleh DPU memang terasa sulit mengingat keadaan alam yang ada. Tanah yang gambut memang disadari masyarakat sebagai suatu persoalan yang sebenarnya bukan berasal dari DPU, namun menurut responden DPU tidak bisa menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan untuk tidak bekerja dengan baik, setidaknya usia jalan bisa lebih lama dari yang diperkirakan. Berikut ini adalah tabel tentang tanggapan responden mengenai kreatifitas DPU dalam pemeliharaan jalan.

Tabel III.4  
Tanggapan Responden Terhadap Kreatifitas DPU  
dalam Pemeliharaan Jalan Setelah peningkatan Jalan Ibukota Kecamatan  
Gaung Anak Serka

No	Indikator	Kategori Jawaban (%)			Jumlah (%)	
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik		
1	Adanya Pembatasan Kendaraan	10 (45,45%)	8 (36,36%)	4 (18,18%)	22	100
2	Adanya Program Peninggian Jalan	6 (27,27%)	9 (40,90%)	7 (31,81%)	22	100
Jumlah		16	17	11	44	200
Rata-Rata		8	9	5	22	100
Persentase		36,36%	40,90%	22,72%		

Sumber: Data Olahan lapangan Tahun 2013

Tabel tersebut menggambarkan bahwa kebijakan pembatasan kendaraan menurut responden merupakan sesuatu yang positif untuk memelihara jalan yang telah dibangun, ini dilakukan untuk menghindari atau untuk memperlambat penurunan jalan. Dari 22 responden 10 orang menyatakan kebijakan pembatasan kendaraan tersebut baik, 8 orang menyatakan cukup baik dan hanya 4 orang yang menyatakan kurang baik. Sementara mengenai pemeliharaan dalam hal peninggian jalan bagi kondisi jalan yang telah mengalami penurunan dinilai responden dengan baik hanya 6 orang, cukup baik 9 orang dan

kurang baik 7 orang. Ini menandakan bahwa kegiatan peninggian jalan juga cukup memuaskan bagi masyarakat.

### **Tanggungjawab**

Yaitu indikator yang berhubungan dengan hal-hal yang menjadi tanggung jawab instansi dan dapat dikendalikan oleh instansi yang bersangkutan diberi bobot yang lebih tinggi daripada indikator yang menggambarkan hasil kegiatan yang di luar kendali. Pekerjaan yang sifatnya susah untuk dilaksanakan oleh DPU karena masih dalam lingkup tanmgungjawabnya maka DPU tetap berkomitmen untuk menyelesaikannya.

DPU sebagai organisasi yang memiliki tanggungjawab besar terhadap pelayanan infrastruktur yang dalam hal ini di Kota Tembilahan memang selalu dituntut untuk memberikan yang terbaik. Pelaksanaan program secara bertanggungjawab sangat diharapkan masyarakat Kota Tembilahan agar setiap pembangunan infrastruktur yang telah ada dapat dijaga dan dikembangkan lagi. Pertanggungjawaban dalam hal ini tidak saja pertanggungjawaban kepada pemerintah di atasnya atau pertanggungjawaban anggaran yangb telah digunakan. Lebih daripada itu pertanggungjawaban terhadap masyarakat sebagai objek pembangunan tersebut harus ada, DPU bertanggungjawab dengan apa yang telah dibangunnya, misalnya jalan yang telah selesai dibangun harus ada standar keselamatan dalam melewati jalan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Pembangunan Jalan pada 24 Maret 2013 di Kantor DPU Inhil, beliau mengatakan bahwa:

*“Pertanggungjawaban DPU setidaknya ada dua bagian, yang pertama bertanggungjawab kepada Bupati atas penggunaan anggaran, ini kami laporkan dalam bentuk data lengkap agar tidak terjadi anggapan penyelewengan dana, yang kedua adalah pertanggungjawaban terhadap masyarakat sebagai sasaran pembangunan tersebut, pertanggungjawaban ini sebenarnya lebih kepada pertanggungjawaban moral atas apa yang telah kami bangun. Memberikan jaminan keselamatan dalam penggunaan jalan yakni dengan membuat jalan yang berkualitas adalah salah satu komitmen atas tanggungjawab tadi”.*

Mengenai tanggungjawab ini, menurut masyarakat DPU perlu peningkatan lagi, kerja ekstra dalam memberikan jaminan pembangunan jalan dengan kualitas baik sangat diutamakan mengingat kondisi tanah untuk membangun jalan di Kota Tembilahan yang membutuhkan dana dua kali lipat dari pembangunan jalan biasa. Jika cara pertanggungjawabannya sama dengan membangun pada kondisi tanah yang biasa maka dapat dipastikan jalan yang telah dibangun tersebut tidak akan bertahan lama dan akan rawan terhadap keselamatan penggunaanya (masyarakat).

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan tanggapan masyarakat terhadap pertanggungjawaban DPU atas jalan yang telah dibangunnya:

Tabel III.5

Tanggapan Responden Terhadap Tanggungjawab DPU  
Terhadap pekerjaan peningkatan Jalan Ibukota Kecamatan Gaung Anak  
Serka yang Telah Dibangun

No	Indikator	Kategori Jawaban (%)			Jumlah (%)	
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik		
1	Jalan yang dibangun aman dilalui pengguna jalan	8 (36,36%)	8 (36,36%)	6 (27,27%)	22	100
2	DPU memantau kondisi jalan secara rutin	4 (18,18%)	6 (27,27%)	12 (54,54%)	22	100
Jumlah		12	14	18	44	200
Rata-Rata		6	7	9	22	100
Persentase		27,27%	31,81%	40,90%		

Sumber: Data Olahan lapangan Tahun 2013

Tabel tersebut menggambarkan bahwa keamanan jalan yang telah dibangun oleh DPU ditanggapi responden dengan baik sebesar 36,36% dari 22 responden, ini sama dengan tanggapan responden cukup baik. Sementara yang menyatakan kurang baik terdiri atas 27,27% atau 6 orang dari 22 responden. Ini menandakan bahwa kepuasan masyarakat terhadap keamanan melalui jalan yang dibangun DPU dapat dikategorikan baik.

#### Kesimpulan

Dari hasil analisis data dan pembahasan, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Perbaikan jalan di Kecamatan GAS yang dilakukan oleh DPU dari tahun ke tahun dijawab responden dengan kategori baik sebesar 7 orang, sama dengan yang menyatakan kurang baik, sementara yang menyatakan cukup adalah sebesar 8 orang. Ini berarti dapat disimpulkan bahwa perbaikan jalan belum sepenuhnya merata. Sementara dari segi respon DPU terhadap kondisi jalan yang rusak dinilai masyarakat kurang baik yakni sebesar 10 orang, sementara yang menyatakan baik dan cukup baik masing-masing 6 orang. Ini pertanda bahwa DPU masih terkesan lamban dalam pengawasan pekerjaan peningkatan Jalan Ibukota Kecamatan Gaung Anak Serka.
2. Adanya pemeliharaan jalan oleh DPU setelah selesainya jalan tersebut dibangun ditanggapi responden dengan baik sebesar 8 orang atau 36,36% dari 22 responden. Sementara yang mengatakan cukup baik pemeliharaan itu sebanyak 7 orang atau 31,81% dari 22 orang. Sedangkan yang menyatakan kurang baik terdapat 7 orang atau 31,81%

dari keseluruhan responden. Ini menandakan bahwa jalan yang telah dibangun dan dipelihara oleh DPU masih beragam tanggapan dari masyarakat, ini dikarenakan adanya beberapa wilayah yang prioritas pengerjaannya diutamakan sehingga masyarakat yang tinggal di wilayah yang bukan prioritas merasa jalan di wilayahnya itu cenderung kurang perhatian. Sementara keikutsertaan masyarakat dalam pemeliharaan jalan yang telah dibangun menurut masyarakat mendapat nilai lebih dalam hal kinerja DPU. Setelah jalan selesai dibangun DPU selalu membuat tulisan agar jalan yang dibangun dijaga oleh masyarakat, ajakan tersebut merupakan salah satu upaya DPU selain melakukan pemantauan dalam 6 bulan sekali. Menurut masyarakat yang terlihat pada tabel di atas, pemeliharaan DPU terhadap jalan cukup baik, dari 22 orang responden, 9 orang diantaranya menyatakan cukup baik pemeliharannya. Sementara yang menyatakan baik sebanyak 7 orang dan yang menyatakan kurang baik hanya 6 orang.

3. Kebijakan pembatasan kendaraan menurut responden merupakan sesuatu yang positif untuk memelihara jalan yang telah dibangun, ini dilakukan untuk menghindari atau untuk memperlambat penurunan jalan. Dari 22 responden 10 orang menyatakan kebijakan pembatasan kendaraan tersebut baik, 8 orang menyatakan cukup baik dan hanya 4 orang yang menyatakan kurang baik. Sementara mengenai pemeliharaan dalam hal peninggian jalan bagi kondisi jalan yang telah mengalami penurunan dinilai responden dengan baik hanya 6 orang, cukup baik 9 orang dan kurang baik 7 orang. Ini menandakan bahwa kegiatan peninggian jalan juga cukup memuaskan bagi masyarakat.
4. Keamanan jalan yang telah dibangun oleh DPU ditanggapi responden dengan baik sebesar 36,36% dari 22 responden, ini sama dengan tanggapan responden cukup baik. Sementara yang menyatakan kurang baik terdiri atas 27,27% atau 6 orang dari 22 responden. Ini menandakan bahwa kepuasan masyarakat terhadap keamanan melalui jalan yang dibangun DPU dapat dikategorikan baik. Sementara itu bentuk pertanggungjawaban lain DPU yakni pemantauan kondisi jalan secara rutin merupakan salah satu kelemahan dinas ini, dari hasil kuisioner penulis, didapat suatu kenyataan bahwa yang menyatakan baik atau pemantauan rutin dilakukan oleh DPU hanya dijawab responden dengan 18,18% atau 4 dari 22 orang responden. Sementara yang menyatakan cukup baik juga tergolong rendah yakni 27,27% atau setara dengan 6 orang dari 22 responden. Yang menyatakan kurang dalam hal pemantauan rutin ini tergolong tinggi yakni 54,54% atau 12 dari 22 orang responden.